

BAB III

APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA TAHUN 2015-2019

3.1 Aplikasi *Territorial Denial* Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Territorial Denial, indikator ini diaplikasikan ketika suatu negara superior sering mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai wilayah pementasan angkatan darat atau tempat transit angkatan laut. Maka bentuk *territorial denial* adalah berusaha untuk menghalangi kekuatan superior dengan cara menolak akses agar kekuatan asing tidak memiliki pengaruh disuatu wilayah tertentu dengan cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya bertarung dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja (Pape, 2005, p. 36).

Berdasarkan definisi *territorial denial*, Tiongkok dapat disebut sebagai negara superior yang mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai wilayah pementasan angkatan darat. Beberapa Pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini peristiwa pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). Pada tahun yang sama juga Tiongkok melanjutkan pengaruhnya dengan memberikan sumbangan peralatan militer kepada angkatan pertahanan Papua Nugini sebanyak 44 *troop carriers*, 10 kendaraan

lapis baja, empat bus berisi 45 kursi, empat van serta suku cadangnya yang bernilai USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018). Dan peristiwa pada tanggal 26 Juli 2018, kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018).

Namun, belum ada upaya *territorial denial* Australia untuk mengimbangi pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini. Australia belum melakukan penolakan akses teritorial secara langsung kepada Tiongkok. Sebagaimana Robert Pape menjelaskan bahwa suatu negara mengimbangi negara lain dengan cara menolak akses teritorial atau meningkatkan masalah logistik atau memaksa Tiongkok untuk bertarung dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja.

Pape (2005) menjelaskan bahwa untuk melakukan *territorial denial*, sebuah negara menolak akses teritorial dengan cara menolak secara langsung. Studi kasus yang pernah terjadi adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah teritorial Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat AS. Hal ini didahului oleh permintaan AS kepada Turki untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan angkatan darat AS melalui Turki untuk menginvasi Irak. Namun Turki tidak menyetujui rencana AS tersebut dengan cara Turki menjawab “pemerintah telah mengindikasikan kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali penempatan pasukan angkatan darat AS di Turki” (Gordon, 2003).

Meskipun Australia tidak mengaplikasikan *territorial denial*, namun pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok telah diimbangi oleh Australia dengan menggunakan

upaya lain yakni mengaplikasikan *signal of resolve to balance* yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

3.2 Aplikasi *Entangling Diplomacy* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh

Tiongkok di Papua Nugini

Entangling Diplomacy, dari indikator ini menjelaskan cara untuk mengimbangi negara lain dengan menggunakan organisasi internasional dan manuver diplomatik. Tujuannya adalah untuk menunda, memperumit dan mencegah negara lain menghasilkan perang. Selain itu, *entangling diplomacy* juga bertujuan untuk merusak rencana dan kebijakan negara superior khususnya dengan menggunakan norma institusi internasional (Pape, 2005, p. 36).

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya dengan cara melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Contohnya adalah pada saat kunjungan mantan PM Peter O'Neill berkunjung di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan tekanan kepada Pemerintah Papua Nugini untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017).

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang membahayakan seperti pembagunan kontruksi yang menciptakan bentrokan dengan berbagai pihak yakni nelayan, penjaga pantai dan kerusakan aset laut (Hill C. , 2016). Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan global berdasar hukum di Indo-Pasifik mengalami tekanan yang signifikan. Kepentingan dan hubungannya dengan Tiongkok sedang diuji (Hill C. , 2016).

Berdasarkan studi kasus tersebut diketahui bahwa Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah sebuah ambisi Tiongkok yang tidak bersesuaian kepentingan Australia yakni pendukung tatanan global berdasar hukum di Kawasan Indo-Pasifik. Kemudian Australia berada dalam perspektif yang berbeda dengan Papua Nugini terkait pengakuannya terhadap posisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Hal ini berlawanan dengan kepentingan Australia yakni” kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan sesuai dengan tatanan global berdasar hukum; Maksudnya adalah agar kawasan Indo-Pasifik yang stabil dapat menguntungkan Australia dari segi perdagangan. Kawasannya termasuk Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan jalur komunikasi laut di Samudera India dan Pasifik. Jika kawasan tersebut stabil maka dapat dipastikan Australia memiliki akses yang bebas, terbuka dan menguntungkan (Australian Government:Defence White Paper, 2016, pp. 17-18).

Dengan demikian, Australia mengimbangi Tiongkok dengan menggunakan upaya *entangling diplomacy*. Australia bekerjasama dengan menggunakan *manuver* diplomatik, bekerjasama dengan negara lain untuk meyakinkan Tiongkok tentang resiko dari tindakan sepihaknya di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Upaya *Entangling Diplomacy* Australia dapat ditelusuri dari upaya ASEAN yang melibatkan AS dan Tiongkok seperti KTT Asia Timur. Keikutsertaan Australia dalam KTT Asia Timur adalah rencana diplomatis dan strategis utama Australia untuk mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan secara multilateral (Hill C. , 2016).

Australia menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan mencegah ambisi Tiongkok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan pernyataan bersama dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut berisi desakan agar Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konfensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 2016 (Liu, 2017). Pernyataan bersama diumumkan selama 50th ASEAN *Ministrial Meeting* berlangsung. Pernyataan ketiga negara tersebut adalah (Gao, 2017)

“The ministers called on China and the Philippines to abide by the Arbitral tribunal’s 2016 Award in the Philippines-China arbitration, as it is final and legally binding on both parties... The minister urged ASEAN member states and China to fully and effectively implement the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea(DOC)”

Setelah itu, Australia, Jepang dan AS menegaskan kembali bahwa Tiongkok dan anggota ASEAN perlu untuk membuat *Code of Conduct* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum internasional. Pertanyaan tersebut adalah (Gao, 2017)

“The ministers acknowledged the announced consensus on a framework for the Code of Conduct for the South China Sea(COC). The minister further urged ASEAN member and China to ensure that the COC be finalized in a timely manner, and that it be legally binding, meaningful, effective, and consistent with international law”

3.3 Aplikasi *Economic Strengthening* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Economic strengthening adalah membangun suatu blok perdagangan dalam upaya menyeimbangkan kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat didukung oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan yang

besar baik dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbangnya, setidaknya untuk jangka panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Salah satu cara adalah dengan membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi dengan tidak menyertakan negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara keseluruhan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior (Pape, 2005, p. 36).

3.3.1 *Seasonal Workers Program* sebagai *Economic Strengthening* Australia

dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Studi kasus yang dapat masuk dalam indikator *economic Strengthening* adalah *Seasonal Workers Program*. Program ini muncul bukan dijadikan sebagai mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok, namun dapat dijadikan sebagai upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik demi meningkatkan keamanan regional (Hegarty, 2015, p. 9) sesuai dengan kepentingan Australia yakni menjaga keamanan regional dan meningkatkan pengaruh di Pasifik (Australian Government: Defence White Paper, 2016). Untuk itu perlu diketahui apa saja Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini, lalu menjelaskan *Seasonal Workers Program* sebagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan pengaruh di Pasifik khususnya di Papua Nugini.

Menurut McKenna (2014) bahwa pengaruh Tiongkok di Pasifik membuat Pasifik kini memiliki pilihan untuk bermitra dimana sebelumnya tidak, sehingga Australia kehilangan kepentingannya yakni tidak lagi dapat mengendalikan ruang kebijakan (McKenna, 2014). Artinya adalah penurunan pengaruh

pemerintah Australia di Pasifik Selatan akan mengurangi kemampuan untuk mengontrol Keamanan Australia (Hegarty, 2015, p. 8).

Lalu pengaruh ekonomi Tiongkok apa saja yang membuat Australia tersaingi? Berikut pengaruh Ekonomi Tiongkok di Papua Nugini.

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (2018). Dengan demikian, Papua Nugini adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok. Secara keseluruhan bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur, pelayanan dan transportasi. Namun, total bantuan luar negeri Tiongkok berada pada sektor transportasi sebesar 28% ,pendidikan sebesar 18%, industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).

Pengaruh Tiongkok yang ada tentunya Australia perlu untuk mengimbangnya dengan melakukan pengaruh yang lebih banyak di Papua Nugini daripada Tiongkok. Salah satu bentuk perimbangan Australia terhadap Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang sesuai dengan *economic strengthening* adalah *Seasonal Workers Program*.

Seasonal Workers Program sebuah program bagi pengusaha untuk merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-negara Pasifik untuk bekerja di Australia. *Seasonal Workers Program* dimulai sejak tahun 2012

hingga saat ini (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019). Istilah *seasonal* atau musiman adalah sebuah peluang bagi pekerja asal Pasifik untuk memiliki kesempatan bekerja di Australia jika pekerja lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan musiman. Sehingga bagi petani yang mengikuti program tersebut disebut *Seasonal Workers*.

Seasonal Workers memiliki keuntungan untuk mendapatkan gaji dan kesempatan belajar yang berharga di Australia. Banyak dari *Seasonal Workers* mampu memanfaatkan gaji tersebut untuk membiayai pendidikan anaknya, memulai bisnis baru atau membangun rumah. Sehingga bagi para petani, ini adalah sebuah kesempatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Target dari negara asal petani adalah negara kepulauan Pasifik. Petani yang telah berpartisipasi adalah Papua Nugini, Tonga, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019).

Partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program* dari tahun ke tahun meningkat. Meskipun sejak dibentuknya *Seasonal Workers Program* tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat adanya peningkatan akan partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program*. Dikutip dari *Australian Bureau of Agricultural and Resources Economic and Sciences*, berikut tabel partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program* (Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Steneke, 2018)

Tabel 3. 1 Partisipasi Papua Nugini dalam Seasonal Workers Program dari tahun 2012-2016

Negara	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Papua Nugini	26	26	35	42

Melalui *Seasonal Workers Program*, Australia membentuk sebuah blok perdagangan yang menguntungkan antar sesama anggotanya dimana anggotanya terdiri dari Australia, Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya tanpa Tiongkok. Hal ini sesuai dengan definisi *economic strengthening* yakni membentuk sebuah blok perdagangan tanpa adanya negara superior (Pape, 2005, p. 36).

3.3.2 Kerjasama Sistem Kabel Laut Koral sebagai *Economic Strengthening*

Australia dalam mengimbangi Huawei di Papua Nugini

Pada tahun 2016, *Huawei Marine*, perusahaan *private* gabungan *Huawei Technologies Co.,Ltd* dan *Global Marine System Limited* mengumumkan akan membantu Papua Nugini untuk membangun sebuah Jaringan Transmisi *Broadband* Nasional. *Huawei Marine* bersama perusahaan telekomunikasi negara, *PNG Dataco Limited* akan membangun sebuah jaringan kabel bawah laut nasional sepanjang 5.457 km untuk menyediakan dan menyambungkan jaringan telekomunikasi di 14 kota dan wilayah pesisir. Rencananya, kapasitas dari desain dari pembangunan jaringan kabel bawah laut tersebut sebesar 8 Terabita per detik (Huawei, 2016). Pada tahun 2017, proyek *National Broadband Network* telah

selesai dibangun dengan biaya sebesar USD 50.94 juta. Dana proyek berasal dari dana gabungan antara *GoPNG* dan *Eximbank China* (Lowy Institute, 2018).

Tujuan pembangunan jaringan tersebut adalah sebagai respon dari permintaan akan akses internet dan membantu mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi di Papua Nugini. Menurut *PNG Dataco*, sistem ini sangat penting bagi Papua Nugini, karena selain mencakup jaringan kabel bawah juga menyediakan pintu gerbang internet dan pusat data. Sehingga dapat memperbaiki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Papua Nugini (Huawei, 2016).

Padahal perspektif Australia akan Huawei adalah sebuah ancaman siber. Huawei diduga dapat menggunakan aktivitas spionase. Menurut mantan PM Malcolm Turnbull menyatakan dalam wawancara CNBC bahwa Australia telah berusaha untuk menyertakan Huawei dan ZTE sebagai vendor jaringan 5G di Australia, namun tetap tidak karena Australia belum mampu untuk mengurangi ancaman oleh vendor tersebut. Ancaman dapat berupa spionase melalui jaringan seluler berkecepatan tinggi (Choudrhury, 2019).

Sehingga bentuk *Economic Strengthening* Australia untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*). Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara tanpa Tiongkok. Pada tanggal 11 Juli 2018, Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon telah memandatangani *MoU* Sistem Kabel Laut Koral (Coral Sea Cable

System, 2018). Pembangunan sistem ini dibiayai sebagian besar oleh *Australian Aid* Berikut Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral (Coral Sea Cable System, 2018)

Tabel 3. 2 Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral

<i>Momerandum of Understanding of System Coral Cable System</i>	11 Juli 2018	Selesai
<i>Design Finalisation</i>	September 2018	Selesai
<i>Marine Survey</i>	November 2018	Selesai
<i>Power Feed Equipment (PFE Manufacture)</i>	Januari 2019	Selesai
<i>Cable Manufacture</i>	April 2019	Selesai
<i>Equipment manufacture</i>	Maret 2019	Selesai
<i>Landing facilities and Land Cable Duct Run</i>	Juli 2019	Proses
<i>Ship to sites</i>	Agustus 2019	Proses
<i>Station Instalation</i>	September 2019	Proses
<i>Cable main lay</i>	Oktober 2019	Proses
<i>System Commissioning</i>	Desember 2019	Belum dimulai

Sistem Kabel Laut Koral adalah sebuah pembangunan kabel bawah laut fiber sepanjang 4.700km yang menghubungkan Sidney ke Port Moresby dan Honiara. Total kapasitas dari pembangunan sistem kabel tersebut adalah sebesar 40 Tpbs. Pembangunan tersebut akan menyediakan infrastruktur komunikasi yang lebih cepat, murah dan dapat diandalkan untuk memajukan perkembangan ekonomi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Salah satu Perkembangan ekonomi yang dimaksud adalah memudahkan para bisnis lokal untuk menggunakan internet demi mencapai pasar mancanegara (Coral Sea cable System, 2018).

Dari Kerjasama ketiga negara tersebut pada akhirnya adalah sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antar ketiga negara tanpa adanya Tiongkok. Upaya pembangunan Sistem Kabel Laut Koral juga dapat memperkuat ekonomi antar Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Sehingga. Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena anggota kerjasama disini selain negara superior dengan tujuan menguatkan ekonomi blok perdagangan setidaknya bagi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

3.3.3 Upaya Ekspor, Impor dan Investasi sebagai bagian dari *Economic*

Strengthening dalam upaya mengimbangi Pengaruh Perdagangan dan Investasi Tiongkok di Papua Nugini

Selain bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur dari Huawei, Tiongkok mengekspresikan hubungannya dengan Papua Nugini melalui Hubungan Investasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *China Power*

menuliskan bahwa Investasi Tiongkok kepada Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$1,418 Miliar (China Power, 2017) sedangkan hubungan dagangnya jika ditinjau dari ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$2,406 Miliar dengan produk ekspor terdiri dari Peralatan Penyiaran, ban karet, senyawa kimia *sodium* dan *potasium peroxide*, kapal kargo dan penumpang ke Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Sedangkan, jika ditinjau dari Impor Tiongkok ke Papua Nugini, maka sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$5,17 Miliar dimana Tiongkok mengimpor minyak dan gas bumi, kayu, nikel, tembaga dan logam mulia dari Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017).

Maka, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut maka Australia mengaplikasikan *economic strengthening* dengan melakukan ekspor, impor dan investasi di Papua Nugini lebih banyak daripada Tiongkok. Jika ditinjau dari nominal ekspor, sejak tahun 2015-2018 nilai ekspor Australia terhadap Papua Nugini bernilai \$5,649 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019) sedangkan Ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 sebesar \$2,406 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Dari segi impor, nilai impor Australia terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai sebesar \$10,951 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019) sedangkan nilai impor Tiongkok terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2017

bernilai sebesar \$5,17 (The Observatory of Economic Complexity, 2017) Jika ditinjau dari segi Investasi, maka nilai Investasi Australia di Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai \$37 Miliar (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2016; Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018). Sedangkan nilai investasi Tiongkok di Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai \$1,418 Miliar (China Power, 2017).

3.3.4 Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik sebagai

Economic Strengthening Australia dalam mengimbangi Pengaruh

Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini

Berdasarkan data dari *Lowy Institute* (2018), Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut (Lowy Institute, 2018).

Tabel 3. 3 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018

Tahun	Nama Proyek	Biaya	Sektor	Keterangan
2012 di mulai 2015 ditunda 2016 peresmian	<i>Waigani Convention Centre</i>	USD 3.96 juta	Infrastruktur lainnya	100% selesai
2015	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 11.83 Juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2016	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 9.19 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai

2015	<i>Western Pacific University</i>	USD 25.35 juta	Pendidikan	0% progres
2016	<i>New Ensa Provincial Hospital</i>	USD 162.64	Kesehatan	0% progres
2016	<i>Community College</i>	USD 9.27 Juta	Pendidikan	100% selesai
2017	<i>Telikom(PNG) Limited</i>	USD 1.52 juta	Komunikasi	100% selesai
2017	<i>50-MW Edevu Hydropower Project</i>	USD 217.60 juta	Energi	0% progres
2017	<i>High Priority Economic Road Project</i>	USD 3.50 miliar	Transportasi	0% progres
2017	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 1.52 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2017	<i>Garoka Town Water Supply</i>	USD 32 juta	Air dan Sanitasi	0% progres
2017	<i>Integrated Agricultural Industrial parks in Western Highlands and Eastern Highlands</i>	USD 330 juta	Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan	0% progres
2017	<i>Kokopo Town Sewerage</i>	USD 1.65 juta	Air dan Sanitasi	100% selesai
2017	<i>National Broadband Network</i>	USD 50.94 juta	Komunikasi	100% selesai
2018	<i>132KV Transmission Lines</i>	USD143.07	Energi	0% progres

Maka *Economic Strengthening* Australia adalah membangun sebuah blok perdagangan yang beranggotakan AS dan Jepang. Blok perdagangan tersebut

berjudul Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik (*Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific*).

Kerjasama Trilateral untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik memiliki mandat untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat dan mematuhi standar global. Pembangunan yang bersifat berkelanjutan yang mematuhi standar sosial, buruh dan lingkungan, memastikan transparansi dan menciptakan peluang ekonomi untuk semua termasuk perempuan dan pekerja lokal yang menghormati kedaulatan nasional tuan rumah (Export Finance Australia, 2019).

Pada tanggal 12 November, beberapa pihak telah menandatangani MoU. Pihak tersebut berasal dari Departemen Urusan Luar Negeri Perdagangan Australia, *Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)*, *the Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, dan *the U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC)*. Kerjasama trilateral tersebut bertujuan untuk membangun proyek infrastruktur, meningkatkan konektivitas digital dan infrastruktur energi. Kerjasama Trilateral ini akan berkonsultasi dengan berbagai negara di Indo-Pasifik termasuk Papua Nugini (Prime Minister of Australia, 2018).

Pada bulan April 2019, ketiga negara telah berkunjung ke Papua Nugini. Mereka berkonsultasi dengan pemerintah, sektor swasta dan sektor relevan lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi proyek infrastruktur yang berpotensi dibangun dan dibiayai bersama (Export Finance Australia, 2019).

Australia sebagai bagian dari anggota kerjasama trilateral telah berkomitmen akan memberikan dana Papua Nugini dan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Pada bulan Juli, agensi keuangan yang melayani secara finansial ekportir Australia kepada konsumennya di Pasifik dan luar Indo-Pasifik yakni EFIC telah mengembangkan mandatnya dengan membuat *Australian Infrastructute Financing Facility for the Pacific (AIFFP)* (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).

AIFFP berfungsi sebagai penyedia jasa jaminan dan pinjaman untuk proyek infrastruktur seperti telekomunikasi, energy, transportasi, akses air dan infrastruktur prioritas lainnya di Pasifik dan Timor Leste (Australian Government: Department of Foregin Affairs and Trade, 2019). Dana yang ada didalamnya sekitar US\$ 2 miliar yang terdiri dari dana hibah dan pinjaman (Australian Government: Department of Foregin Affairs and Trade, 2019). Berikut jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang dan AS di Papua Nugini

Tabel 3. 4 Jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang dan AS di Papua Nugini

Kegiatan	Waktu	Keterangan
Penandatanganan MoU	12 November 2018	Selesai

Identifikasi Proyek Potensial di Papua Nugini	April 2019	Selesai
Pembentukan <i>AIFFP</i>	Juli 2019	Selesai

3.4 Aplikasi *Signals of Resolve to Balance* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Signals of Resolve to Balance, Pape menjelaskan bahwa strategi ini dan keseluruhannya adalah permainan koordinasi dimana berkoordinasi secara timbal balik untuk menentang kebijakan negara superior atau negara yang mengancam. Jika beberapa negara dapat bekerjasama dan berulang ulang melakukan beberapa indikator lainnya yakni *territorial denial*, *entangling diplomacy* dan *economic strengthening*, maka mereka secara bertahap meningkatkan rasa saling percaya untuk bekerjasama melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Berdasarkan penelitian ini, Australia telah melakukan indikator *signals of resolve to balance*. Hal ini didasarkan berbagai akumulasi pengaruh Tiongkok di Papua Nugini (Motegi, 2019). Pada sub bab ini akan menjelaskan dua pengaruh Tiongkok di Papua Nugini. Pertama kerjasama militer Tiongkok dan Papua Nugini. Kedua adalah Pengaruh Tiongkok melalui Proyek Infrastruktur di Papua Nugini.

3.4.1 Inisiasi Bersama Lombrum sebagai *Signals of Resolve to Balance*

Australia dalam Mengimbangi Kerjasama Militer antara Tiongkok dan Papua Nugini

Berikut beberapa *high visit diplomacy* antara Tiongkok dan Papua Nugini dari segi militer. Pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini. Menurut Xie Bing, Tiongkok telah membantu berkontribusi dalam hal infrastruktur dan peningkatan kapasitas tentara Papua Nugini sehingga harapannya hubungan militer antar keduanya semakin kuat (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). Berdasarkan penjelasan *engagement* dari segi militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, maka dapat penulis analisis bahwa *engagement* tersebut studi kasus untuk menjabarkan Teori Ancaman Tiongkok yakni ia menggunakan berbagai kekuatannya baik itu *high visit diplomacy*, untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik.

Pada tanggal 26 Juli 2018, Papua Nugini dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama militer. Dimulai dengan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya. Kapal tersebut digunakan untuk layanan medis kemanusiaan kepada Papua Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) (Motegi, 2019).

Maka bentuk *signals of resolve to balance* adalah Australia melakukan inisiasi yakni melanjutkan kerjasama melalui pengembangan ulang Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, Papua Nugini. Pada tanggal 1 November 2018, PM Scott Morrison dan O'Neill mengumumkan secara resmi dibentuknya sebuah inisiasi yakni Inisiasi Bersama Lombrum atau lebih dikenal dengan *The Lombrum Joint Initiative* (Prime Minister of Australia, 2018).

Selain itu, AS sebagai sekutu Australia juga memiliki niat untuk bergabung dalam inisiasi tersebut. Hal ini dinyatakan langsung oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence pada saat konferensi tingkat tinggi APEC di Papua Nugini pada tanggal 16 November 2018. Pada saat konferensi berlangsung, Mike Pence mengumumkan bahwa akan bergabung dengan inisiasi tersebut (Mike Pence, 2018).

Berdasarkan penggambaran kerjasama tersebut, penulis menganalisis bahwa Ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan *Signals of resolve to balance* oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka bekerjasama dalam pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum tersebut. Hal ini dapat disesuaikan dengan defenisinya bahwa jika beberapa negara dapat bekerja sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan kepercayaan antar mereka dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Untuk memperkuat analisis *signals of resolve to balance*, Australia bersama negara lain yakni AS dan negara *second ranked powers* yakni Jepang dan Papua Nugini melakukan *soft balancing* secara berulang ulang. Kerjasama tersebut

dapat ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembangunan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS dan Jepang dalam melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan ASEAN sebagai *manuver* diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Australia dan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon membangun sebuah blok perdagangan melalui *Seasonal Workers Program*. Dan, AS dan Jepang turut bekerjasama dengan Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini melalui Kerjasama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik.